

## **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat**

**Fahri Aji Suryana**<sup>1</sup>, Gotfridrus Goris Seran<sup>2</sup>, Cecep Wahyudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Djuanda Bogor

Email: Fahriajisuryana@gmail.com

### **ABSTRAK**

(Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi subjek penelitian terkait partisipasi dalam forum perencanaan pembangunan ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara semi-terstruktur. Validitas dan reliabilitas data ditingkatkan melalui teknik triangulasi, yang melibatkan pemanfaatan berbagai sumber informasi, metode pengumpulan data, dan tinjauan teoritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terwujud dalam berbagai tahapan Musrenbang. Dalam perencanaan, partisipasi terstruktur melalui Rembuk RW, di mana usulan pembangunan dari masyarakat diidentifikasi dan diprioritaskan secara bottom-up. Pelaksanaan Musrenbang melibatkan penyampaian usulan dan identifikasi permasalahan oleh perwakilan masyarakat. Pemanfaatan hasil Musrenbang dirasakan positif, terutama dalam perbaikan infrastruktur, meskipun realisasinya terbatas oleh anggaran. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung dan penyampaian umpan balik, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mengawal program pembangunan.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses multidimensional dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu negara atau masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aspek krusial, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan lingkungan. Esensi dari pembangunan adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya.

Dalam konteks ini, pemahaman pembangunan melampaui indikator ekonomi semata seperti Produk Domestik Bruto (PDB), dan mencakup pembangunan manusia yang esensial, meliputi kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Pembangunan ekonomi memainkan peran signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perluasan akses terhadap sumber daya. Namun, keberlanjutan pembangunan juga menuntut perhatian terhadap aspek lingkungan, seperti konservasi sumber daya alam, mitigasi polusi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan memegang peranan vital. Partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, implementasi proyek, serta monitoring dan evaluasi, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Partisipasi ini juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan yang efektif memerlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Di Indonesia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif berjenjang yang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan wilayah. Keberhasilan Musrenbang sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Forum ini tidak hanya menjadi wadah perumusan kebijakan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan, yang esensial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan kebijakan yang responsive. Musrenbang dapat berjalan dengan adanya kolaborasi multi pihak dari berbagai unsur pemerintahan, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya (Wahyudin, et al., 2024).

Partisipasi masyarakat diakui sebagai elemen krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan kontribusi aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta proyek pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menjadi relevan dan penting untuk dikaji.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah metode yang relevan untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alaminya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna dan interpretasi subjek penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sifat permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi dan memahami aspek-aspek di balik fenomena sosial, situasi,

peristiwa, peran, dan interaksi dalam konteks Musrenbang, mendasari pemilihan pendekatan kualitatif ini.

Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian (Sujarweni, 2014). Dalam studi ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara semi-terstruktur. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, teknik triangulasi data diterapkan. Triangulasi ini melibatkan pemanfaatan berbagai sumber informasi, metode pengumpulan data yang berbeda, serta tinjauan teoritis yang relevan untuk memverifikasi dan memperkaya data yang diperoleh di lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam bagian ini berupa data-data hasil dari studi pustaka, wawancara mendalam dan dokumentasi Narasumber tersebut meliputi Bapak Agus Mulyadi Selaku Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ketua RW.08 Bapak Hamdani dan Ketua RT.09 Bapak Ali Sadikin, yang berperan sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrawarah rencana pembangunan atau disingkat Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Musrenbang tingkat kecamatan merupakan sebuah metode perencanaan pembangunan yang bersifat kolektif, di mana masyarakat memainkan peran sentral dalam setiap tahapannya. Proses ini, yang didasari oleh semangat kebersamaan atau gotong-royong, memberikan hak kepada warga untuk ikut menentukan dan merencanakan pembangunan di lingkungan mereka. Musrenbang berfungsi sebagai wadah untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, merencanakan program pembangunan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan warga di berbagai tingkatan wilayah. Perencanaan ini didasarkan pada masalah, kebutuhan, harapan, dan potensi sumber daya lokal, sehingga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, Musrenbang menjadi forum

negosiasi dan penyalarsan perbedaan pandangan antara pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah untuk mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan dan anggaran. Keputusan yang diambil melalui musyawarah dianggap lebih valid karena mempertimbangkan perspektif semua peserta. Tujuan utama Musrenbang adalah untuk mengumpulkan dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dari tingkat bawah, menentukan usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, dan memprioritaskan kegiatan desa untuk dibahas di tingkat kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang melibatkan narasumber dari berbagai pihak seperti pemerintah, dinas, LSM, dan tokoh masyarakat, serta peserta yang memiliki hak untuk mengambil keputusan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Peserta ini adalah individu atau kelompok masyarakat yang berada di wilayah tersebut.



**Gambar 4.5 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kebon Jeruk**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025*

Prosedur pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Instruksi Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Proses Musrenbang dilaksanakan secara gradual, dimulai dari level Dusun hingga level Nasional. Output Musrenbang di level Dusun kemudian didiskusikan di level Kecamatan untuk diurutkan prioritasnya sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dirancang dan sangat diperlukan oleh warga. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk turut ikut andil dalam proses pelaksanaan musrenbang untuk memberikan masukan serta aspirasinya

mengenai permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Sehingga nantinya akan melalui tahapan-tahapan untuk dapat ditentukan prioritas program yang tepat bagi masyarakat berdasarkan hasil dari musyawarah antara pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk.



**Gambar 4.4 Proses berjalannya musyawarah di Kecamatan Kebon Jeruk**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025*

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan melalui musrenbang, akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran di setiap tahunnya. Akan tetapi, pada pelaksanaannya bukan hal yang mudah selama pelaksanaan musrenbang. Dikarenakan terdapat faktor-faktor pendukung serta penghambat selama berlangsungnya musyawarah. Dengan demikian, melalui adanya musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk ini, menjadi sebuah wadah untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai permasalahan yang harus segera ditangani di lingkungannya. Sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas mengenai penentuan kebijakan dalam pelaksanaan program pada tahun anggaran di setiap tahunnya.

### **Partisipasi Masyarakat**

#### **Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahapan awal pemerintah dalam rangka memastikan semua kebutuhan dan tujuan akan diselenggarakannya musyawarah rencana pembangunan agar dapat diikuti oleh masyarakat, sehingga gagasan atau ide yang di

sampaikan masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang ada di lingkungannya dapat tersampaikan dengan jelas. Dengan persiapan yang matang, maka pelaksanaan musrenbang akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Se jauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan se jauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan (cohen & Uphof).



**Gambar 4 : Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat**

Adapun peneliti melakukan wawancara yang berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan Kepala Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 25 Maret 2025. Wawancara ini kami khususkan untuk Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk untuk mendapatkan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan. Dari wawancara yang diperoleh peneliti dengan Bapak Agus Mulyadi selaku Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk memberikan pernyataan bahwa :

*“Musrenbang, pada awalnya bernama Pra-Musrenbang. Di tingkat RW, kegiatan ini sekarang disebut Rembuk RW. Sebelum masuk ke Musrenbang tingkat kelurahan atau kecamatan, ada tahapan yang namanya Rembuk RW. Peserta Rembuk RW terdiri dari ketua RT atau masyarakat yang ada di RW tersebut. Mereka diminta masukannya*

*mengenai usulan pembangunan untuk tahun yang akan datang. Jadi, Musrenbang ini akan membahas rencana kegiatan untuk anggaran tahun 2026. Musrenbang merupakan perencanaan pembangunan dari bawah ke atas. Dari tingkat RW, diusulkan 10 prioritas, lalu masuk ke tingkat kelurahan menjadi 5 prioritas. Kemudian, masuk ke tingkat kecamatan menjadi 3 prioritas. Dan untuk tingkat kota, menjadi prioritas 1, 2, atau 3 di tiap RW atau kelurahan. Di tiap kelurahan terdapat beberapa RW. Dari kelurahan, usulan dari 1 RW yang tadinya 10 prioritas, diprioritaskan lagi menjadi 5 yang disepakati bersama pihak lain. Dari 5 prioritas ini, masuk lagi ke tingkat kecamatan menjadi 3. Adapun usulan yang tidak masuk ke dalam prioritas, jika menurut kelurahan dapat dikerjakan tahun ini, maka bisa dikerjakan pada tahun yang sama.” (25/03/2025).*

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Hamdani selaku Ketua RW.08 mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*”Masyarakat itu dilibatkan dari awal, saat memberikan usulan di Rembuk RW. Nanti usulan itu yang kami bawa ke Kecamatan. Jadi, program pembangunan itu asalnya dari kebutuhan masyarakat di bawah di situ warga, RT, tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, semua ikut memberikan usulan., memang dari RW itu yang datang biasanya saya sendiri sebagai Ketua RW, atau perwakilan dari tokoh masyarakat. Tapi usulan-usulan itu tetap dari hasil Rembuk RW di sini.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Sadikin Ketua RT.07 mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*”Betul, saya selaku ketua RT turut ikut dalam musyawarah rencana pembangunan sebagai perwakilan dari RT.07. Kami coba berusaha mengusulin beberapa permasalahan yang ada di ruang tempat kami untuk bisa di masukan kedalam rencana pembangunan. Karena memang ada beberapa hal yang belum terselesaikan seperti jalan rusak” (25/03/2025).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Mulyadi (Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk), Bapak Hamdani (Ketua RW.08), dan Bapak Ali Sadikin (Ketua RT.07) pada tanggal 25 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terstruktur melalui mekanisme perencanaan dari bawah ke atas.

Proses perencanaan dimulai dari tingkat RW melalui forum bernama Rembuk RW. Dalam forum ini, masyarakat yang terdiri dari ketua RT dan warga lainnya menyampaikan usulan pembangunan berdasarkan permasalahan di lingkungan mereka. Usulan-usulan ini kemudian diprioritaskan, dari 10 prioritas di tingkat RW menjadi 5 prioritas di tingkat kelurahan, lalu mengerucut lagi menjadi 3 prioritas di tingkat kecamatan. Selanjutnya, usulan ini akan dibawa ke tingkat kota. Keterlibatan masyarakat terlihat sejak tahap awal pengusulan di Rembuk RW. Meskipun perwakilan yang hadir di tingkat kecamatan dan kelurahan mungkin terbatas (seperti Ketua RW atau tokoh masyarakat), usulan yang dibawa tetap merupakan hasil dari pembahasan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Ketua RT juga berperan aktif dalam menyampaikan permasalahan dan kebutuhan warga dalam forum Musrenbang. Dengan demikian, Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk menunjukkan adanya upaya pemerintah kecamatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dimulai dari identifikasi kebutuhan di tingkat paling bawah hingga menjadi prioritas pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Mekanisme ini memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda (Cohen & Uphof).

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Agus Mulyadi selaku Sekretaris mengenai pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

*"Di tiap kelurahan terdapat beberapa RW. Dari kelurahan, usulan dari 1 RW yang tadinya 10 prioritas, diprioritaskan lagi menjadi 5 yang disepakati bersama pihak lain. Dari 5 prioritas ini, masuk lagi ke tingkat kecamatan menjadi 3. Adapun usulan yang tidak masuk ke dalam prioritas, jika menurut kelurahan dapat dikerjakan tahun ini, maka bisa dikerjakan pada tahun yang sama. Jadi, ketika masyarakat mengusulkan dalam Rembuk RW dan ternyata bisa dikerjakan oleh kami karena kerusakannya kecil atau seperti got mampet, bisa langsung dikerjakan tanpa menunggu tahun depan. Ini berlaku untuk hal-hal yang memungkinkan untuk diselesaikan tahun ini. Selain itu, dalam rencana pembangunan, ada juga usulan yang masuk melalui anggota dewan, yaitu melalui reses. Jadi, ada jalur Musrenbang dan ada jalur reses yang melalui anggota dewan. Keduanya sama-sama berasal dari laporan masyarakat terkait rencana pembangunan yang menjadi prioritas, yang mungkin selama ini menjadi masalah, seperti saluran kecil atau saluran rusak yang dapat menimbulkan dampak besar. Intinya, partisipasi masyarakat sebenarnya sudah ada dari bawah, sejak awal Rembuk RW, melalui keterwakilan dari RT, RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan PKK. Partisipasi di tingkat kelurahan mungkin tidak dihadiri oleh semua orang, melainkan melalui keterwakilan. Namun, tetap ada partisipasi masyarakat untuk membahas ulang usulan dari Rembuk RW di tingkat kelurahan, yang kemudian akan dibahas oleh masing-masing UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah). Misalnya, urusan saluran akan dibahas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA). Jika menurut Dinas SDA usulan ini dapat*

*diteruskan, maka akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, usulan ini juga didiskusikan untuk diusulkan ke tingkat kota.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Hamdani selaku Ketua RW.08 mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*”Kalau di pelaksanaan Musrenbang itu masyarakat utama biasanya memrikan usulan mengenai masalah yang harus di selesaikan di wilayah kita. Memang gak semua masyarakat ikut, tetapi ada perwakilan yang ikut hadir di musrenbang.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Sadikin Ketua RT.07 mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia menjelaskan :

*”Kalau di Musrenbang kami hanya menyampaikan permasalahan yang ada di tempat kami saja, karena memang itu yang tiap hari kami alami. Seperti jalan rusak yang memang belum juga di bereskan sama pemerintah” (25/03/2025).*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Mulyadi (Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk), Bapak Hamdani (Ketua RW.08), dan Bapak Ali Sadikin (Ketua RT.07) pada tanggal 25 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terwujud terutama dalam bentuk penyampaian usulan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lingkungan.

Masyarakat, melalui perwakilan dari RT, RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan PKK, aktif memberikan masukan mengenai kebutuhan pembangunan sejak tahap Rembuk RW. Usulan-usulan ini kemudian dibahas dan diprioritaskan di tingkat kelurahan dan kecamatan sebelum diajukan ke tingkat kota. Selain melalui jalur Musrenbang, aspirasi masyarakat juga dapat tersalurkan melalui reses anggota dewan.

Pelaksanaan Musrenbang menjadi forum bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan secara langsung permasalahan yang ada di wilayah mereka, seperti jalan rusak atau saluran air yang bermasalah. Meskipun partisipasi fisik seluruh masyarakat dalam forum Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan bersifat perwakilan, usulan yang disampaikan tetap mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang telah dibahas di tingkat RW.

Lebih lanjut, terdapat mekanisme respons cepat untuk permasalahan kecil yang teridentifikasi dalam Rembuk RW dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Proses selanjutnya melibatkan pembahasan usulan oleh UKPD terkait di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota untuk menentukan kelayakan dan prioritas pelaksanaan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk berfokus pada penyampaian kebutuhan dan permasalahan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan.

### **Pemanfaatan**

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun (Cohen & Uphof).

Hasil wawancara bersama Bapak Agus Mulyadi selaku Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk mengenai pemanfaatan hasil setelah proyek musrenbang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

*"Alhamdulillah masalah-masalah yang selama ini diusulkan sudah selesai. Biasanya, masalah yang dimasukkan ke dalam Musrenbang itu bersifat fisik. Fisik itu bisa berupa saluran air atau jalan, bisa berupa jembatan, dan juga non-fisik. Non-fisik biasanya berupa pelatihan keterampilan. Hampir 90% usulan yang diajukan untuk proses penganggaran penuntasan permasalahan adalah fisik, baik itu saluran, jalan,*

*termasuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), dan rambu-rambu lalu lintas. Karena keterbatasan anggaran, tidak semua usulan bisa terealisasi. Misalnya, dari 100 masalah yang harus dikerjakan, mungkin hanya 30 yang bisa ditangani, dan ini dibagi lagi ke 7 kelurahan untuk dituntaskan. Ada yang tuntas dalam satu tahun anggaran, ada juga yang tuntas secara bertahap. Jadi, pekerjaan yang diusulkan melalui Musrenbang bisa selesai di tahun berjalan, bisa juga bertahap, misalnya 2 sampai 3 tahun karena volumenya besar. Kalau volumenya kecil, biasanya selesai tahun ini” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Hamdani selaku Ketua RW.08 mengenai pemanfaatan hasil musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*“Saat program musrenbang dapat terealisasi atau bisa dilaksanakan, tentu kita sebagai masyarakat menjadi terbantu akan program yang terjalankan. Memang usulan kita gak semuanya dapat terlaksana. Tapi setidaknya ada program yang dapat dilaksanakan di wilayah kami.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Sadikin Ketua RT.07 mengenai pemanfaatan hasil musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*“Kami selaku masyarakat sangat terbantu jika pemerintah berusaha melalui program yang diberikan Seperti perbaikan jalan yang menjadi penghambat Ketika kita mau kerja.dan beraktifitas sehari-hari pasti kami akan coba rawat dengan baik jika progrmanya memang terealisasikan”(25/03/2025).*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Mulyadi (Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk), Bapak Hamdani (Ketua RW.08), dan Bapak Ali Sadikin (Ketua RT.07) pada tanggal 25 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hasil Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dirasakan secara positif oleh masyarakat meskipun realisasinya terbatas oleh anggaran.

Sebagian besar usulan yang diajukan melalui Musrenbang adalah proyek fisik seperti perbaikan saluran air, jalan, jembatan, PJU, dan rambu lalu lintas. Meskipun tidak semua usulan dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran, masyarakat merasakan manfaat dari program-program yang berhasil dilaksanakan. Realisasi proyek dapat terjadi dalam satu tahun anggaran atau secara bertahap dalam beberapa tahun tergantung pada skala dan volume pekerjaan.

Masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Ketua RW.08 dan Ketua RT.07, merasa terbantu dengan adanya realisasi program Musrenbang, terutama dalam mengatasi permasalahan infrastruktur yang menghambat aktivitas sehari-hari. Bahkan, terdapat indikasi kesediaan masyarakat untuk turut merawat hasil pembangunan yang telah direalisasikan. Dengan demikian, meskipun tidak semua aspirasi dapat terpenuhi, hasil Musrenbang yang terealisasi memberikan dampak positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kecamatan Kebon Jeruk, terutama dalam perbaikan fasilitas fisik. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil terwujud dalam rasa terbantu dan potensi keterlibatan dalam pemeliharaan.

### **Hasil Evaluasi**

Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes (cohen & Uphof).

Hasil Wawancara bersama Bapak Agus Mulyadi Selaku Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat mengenai hasil evaluasi pelaksanaan musrenbang yaitu sebagai berikut :

*“Setelah program dapat terealisasikan, ada yang optimis dan ada juga yang pesimis, itu biasa karena usulan banyak dan yang disetujui hanya beberapa. Tidak usah jauh-jauh, di*

*dalam keluarga saja banyak keinginan, tapi kemampuan orang tua terbatas, pasti ada yang kecewa. Tapi kan tidak bisa dipaksakan karena yang membutuhkan bukan hanya satu kelurahan atau satu RW, semua meminta. Saya rasa kendala ini adalah kendala alami karena kita bukan negara dengan keuntungan terbesar seperti Arab yang bisa mendapatkan hasil dari umroh. Tapi pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semua itu, meskipun pro dan kontra pasti ada.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Hamdani selaku Ketua RW.08 mengenai bagaimana evaluasi atau pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengungkapkan :

*”Kami ikut mengawasi selama proses pembanguan. misalnya kalau ada pembangunan yang tidak sesuai, ya warga lapor. Atau kalau ada hasil pembangunan yang cepat rusak, warga juga menyampaikan.” (25/03/2025).*

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Sadikin Ketua RT.07 mengenai bagaimana evaluasi atau pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ia mengatakan :

*”oh tentu sudah menjadi tugas kami untuk mengawasi setiap program dari pemerintah, agar gak terjadi penyelewengan atau penyalah guunaan anggaran agar programnya dapat terlaksana. Kalo gak diawasih oleh kita, mungkin akan menjadi celah bagi orang-orang yang gak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan melalui program yang akan di laksanakan.” (25/03/2025).*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Mulyadi (Sekretaris Kecamatan Kebon Jeruk), Bapak Hamdani (Ketua RW.08), dan Bapak Ali Sadikin (Ketua RT.07) pada tanggal 25 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terwujud melalui pemantauan langsung dan penyampaian umpan balik terhadap proses dan hasil pembangunan.

Meskipun terdapat dinamika penerimaan hasil pembangunan di masyarakat, dengan sebagian merasa puas dan sebagian lainnya mungkin kecewa karena keterbatasan realisasi usulan, mekanisme pengawasan aktif berjalan. Masyarakat, melalui perwakilannya, turut mengawasi jalannya pembangunan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Umpan balik dari masyarakat berupa laporan ketidaksesuaian pembangunan atau hasil pembangunan yang cepat rusak menjadi bentuk evaluasi yang konstruktif. Pengawasan ini dipandang sebagai tugas penting oleh perwakilan masyarakat, seperti ketua RT, untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran dan memastikan program pembangunan terlaksana dengan baik dan sesuai tujuan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam evaluasi Musrenbang di Kecamatan Kebon Jeruk tidak hanya terbatas pada penerimaan hasil, tetapi juga melibatkan peran aktif dalam mengawasi proses pelaksanaan dan memberikan umpan balik terhadap kualitas dan kesesuaian pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawal program-program yang berasal dari aspirasi mereka.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian-uraian dan tabel diatas yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hal ini selanjutnya penulis mengambil kesimpulan yaitu Pada tahap Perencanaan, partisipasi berjalan terstruktur dan bottom-up, dimulai dari Rembuk RW untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan usulan pembangunan, memastikan program sesuai kebutuhan akar rumput. dalam Pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi aktif dengan menyuarakan usulan dan mengidentifikasi masalah melalui forum Rembuk RW, di mana aspirasi dari tingkat RW tetap terefleksi meski disampaikan melalui perwakilan. Pemanfaatan hasil Musrenbang dirasakan positif, terutama dalam perbaikan infrastruktur fisik

seperti jalan dan saluran air. Meskipun ada keterbatasan anggaran yang memengaruhi realisasi, program yang terlaksana memberikan dampak nyata dan masyarakat menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam pemeliharaan. Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung dan pemberian umpan balik. Masyarakat secara aktif mengawasi kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, bahkan melaporkan ketidaksesuaian atau hasil yang kurang optimal, menunjukkan peran aktif mereka dalam menjaga akuntabilitas.

Pelaksanaan Musrenbang sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, yang diwakili oleh ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Kehadiran mereka krusial dalam menentukan program prioritas untuk Kecamatan Kebon Jeruk. Aspirasi ini kemudian akan melewati penyaringan berjenjang dari tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi. Namun, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

## REFERENSI

- A'an, S. M. & A. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *Jurnal PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. FISIP UI Press.
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL\\_DEA\\_\(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-09-02-30).pdf)
- Erawan, E., Burhanudin, H., Pelaksanaan, T., & Musrenbang, T. P. (2019). STUDI TENTANG PELAKSANAAN MUSRENBANG. *EJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8358–8371.
- Fauziana; Ardiansyah; Annisah Putri. (2024). Analisis rendahnya partisipasi masyarakat pada forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di

- desa kenawat kecamatan lut tawar kabupaten aceh tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 09(November), 1–12.
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 299–303.
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kecamatan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>
- Rahmawati, Mone, A., & Mustari, N. (2021). Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur. *Journal Unismuh*, 2(April).
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Public Partisipation On Implementation Of KOTAKU/PNPM Program In Ciawi Bogor Municipality. *Jurnal Governansi*, 3(2), 71.
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Suryabrata, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo.
- Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., & Alfin Zulfa, A. (2024). COLLABORATIVE BASED TOURISM GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT. *Jurnal Governansi*, 10(2), 147–164. <https://doi.org/10.30997/jgs.v10i2.12974>
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakt Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(418), 11.